



EDISI JUMAT 05 JUNI 2026

H A R I A N

LENTERA

Inspirasi Perubahan

TODAY

02

GOVERNMENTTODAY
AS Usulkan Tarif 10% untuk RI karena Isu Kerja Paksa'

05

NUSANTARA
Noel Terima Vonis 4,5 Tahun Tanpa Perlawanan

10

LISTSTYLE
Dua Lipa dan Tren Baju Nikah Setelan yang Kembali Populer

SETORAN JUMAT: RP100 JUTA UNTUK SILMY

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan praktik korupsi terstruktur dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) yang melibatkan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Silmy Karim. Dalam perkara yang berlangsung sepanjang 2022-2026 itu, penyidik menemukan adanya setoran rutin sebesar Rp100 juta setiap pekan yang disebut diterima Silmy setiap hari Jumat. Dana tersebut berasal dari pungutan tambahan yang dibebankan kepada WNA maupun perusahaan dan biro jasa yang mengurus izin tinggal, melalui mekanisme yang oleh para pelaku disebut "setiap klik ada harganya". Menurut KPK, sedikitnya Rp145,5 miliar terkumpul dari praktik pemerasan tersebut dan kemudian dibagikan kepada sejumlah oknum di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi. Untuk menyamarkan distribusi uang, para pelaku menggunakan sejumlah kode, antara lain istilah "malaikat" untuk menyebut jatah pejabat tinggi, serta kode yang diambil dari formasi grup musik seperti "vokalis", "gitaris", "backing vocal", dan "koreografer" guna menandai penerima aliran dana tertentu. Setelah sempat dicari penyidik, Silmy akhirnya menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada Kamis (4/6). Seusai pemeriksaan, KPK menetapkan Silmy sebagai tersangka dan menahannya bersama 7 tersangka lain. **BACA HAL 11...**



-  **Silmy Karim**
(Wamen Imipias / Eks Dirjen Imigrasi 2023-2024)
-  **Saffar Muhammad Godam**
(Plt. Dirjen Imigrasi 2024-2025)
-  **Jaya Saputra**
(Kakanwil Ditjen Imigrasi Jabar)

-  **Juniadi Sri Priambudi**
(Ketua Tim Alih Status ITAS)
-  **Bagus Bramantyo**
(Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal)
-  **Tessar Bayu Setyaji**
(Kasubdit Alih Status Izin Tinggal)

-  **Ronald Arman Abdullah**
(Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat 2025-2026)

-  **Gusti Benardiansyah**
(Staf Subdit Izin Tinggal)

Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan (Wamen Imipias) Silmy Karim menuju mobil tahanan setelah menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (4/6). Antara

**TERSANGKA
YANG DITAHAN**

AS USULKAN TARIF 10% UNTUK RI KARENA ISU KERJA PAKSA

Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan langkah respons terhadap rencana pemerintah Amerika Serikat (AS) yang mengusulkan tarif tambahan sebesar 10 persen bagi sejumlah produk impor dari Indonesia. Usulan tersebut muncul setelah investigasi yang dilakukan Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) terkait upaya pencegahan masuknya barang yang diproduksi melalui praktik kerja paksa (forced labor).

Investigasi itu dilakukan berdasarkan Section 301 Trade Act of 1974. Dalam hasil investigasi sementara, Indonesia termasuk dalam kelompok negara yang dinilai telah memiliki regulasi terkait pencegahan impor barang hasil kerja paksa, namun implementasinya dianggap belum efektif.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, mengatakan pemerintah saat ini sedang mencermati secara saksama hasil investigasi sementara yang diumumkan USTR.

"Pemerintah Indonesia mencermati pengumuman USTR terkait hasil investigasi sementara berdasarkan Section 301 Trade Act of 1974 mengenai kebijakan dan praktek sejumlah negara dikaitkan dengan upaya pencegahan impor barang yang diproduksi menggunakan praktik



Ilustrasi-Barang impor RI disebut AS dihasilkan melalui praktik kerja paksa, sehingga akan dikenakan tarif tambahan.(ist)

kerja paksa (forced labor)," ujar Haryo dalam keterangan tertulis, Kamis (4/6).

Dalam dokumen tersebut, Indonesia ditempatkan bersama beberapa negara lain seperti Kanada, Ekuador, Uni Eropa, Meksiko, dan

Pakistan yang diusulkan dikenai tarif tambahan sebesar 10 persen. Sementara itu, sebanyak 54 negara lainnya terancam menghadapi tarif lebih tinggi, yakni 12,5 persen, karena dinilai belum memiliki atau belum menerapkan aturan larangan impor

FAKTA-FAKTA BARU KEBIJAKAN TARIF AS

- **Alasan Penerapan:** AS menilai negara mitra belum efektif mencegah masuknya produk hasil kerja paksa, sehingga dianggap merugikan pekerja domestik.
- **Tarif untuk Indonesia:** Produk ekspor Indonesia diusulkan dikenakan tarif tambahan 10%.
- **Kategori Tarif 10%:** Berlaku bagi negara dengan aturan pencegahan kerja paksa yang masih parsial, termasuk Indonesia, Uni Eropa, Kanada, Meksiko, Taiwan, dan Inggris.
- **Kategori Tarif 12,5%:** Diberlakukan untuk negara yang dinilai lemah dalam penegakan aturan kerja paksa, seperti Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, India, Brasil, dan Vietnam.
- **Komoditas Disorot:** Mencakup 34 jenis barang, antara lain CPO, tekstil berbahan kapas, ikan, dan mineral kritis.
- **Produk Dikecualikan:** Sejumlah bahan pangan, bahan bakar tertentu, dan logam yang sudah dikenai tarif sebelumnya.
- **Dasar Hukum:** Menggunakan kewenangan Section 301 setelah kebijakan tarif global sebelumnya dibatalkan Mahkamah Agung AS.
- **Tahap Selanjutnya:** Masukan publik dibuka hingga 6 Juli 2026, dilanjutkan sidang publik pada 7 Juli 2026 sebelum keputusan final.



Eropa Siap Hadapi, Australia Keberatan

SEJUMLAH negara mulai merespons rencana Amerika Serikat (AS) untuk memberlakukan tarif tambahan sebesar 10 persen hingga 12,5 persen terhadap barang impor dari lebih dari 60 negara yang dinilai belum cukup efektif memerangi penggunaan tenaga kerja paksa dalam rantai produksi.

Di Eropa, para pejabat Uni Eropa menilai tarif tambahan 10 persen masih dapat dihadapi. Namun, mereka khawatir langkah itu hanya menjadi awal dari kebijakan yang lebih berat di masa mendatang.

Menurut laporan Politico pada Rabu (3/6), para pejabat Uni Eropa secara tertutup menyatakan blok tersebut masih mampu bertahan jika hanya dikenakan tarif 10 persen.

Kekhawatiran utama mereka justru terletak pada kemungkinan investigasi perdagangan lanjutan yang dapat berujung pada tarif yang jauh lebih tinggi.

Seorang pejabat Uni Eropa bahkan menyebut usulan tarif 10 persen dari Washington "kurang lebih" masih dapat diterima. Meski

demikian, pihaknya masih menunggu rincian lebih lanjut mengenai kebijakan tersebut.

Sementara itu, Kanada menilai kebijakan tersebut tidak mengejutkan. Perdana Menteri Kanada Mark Carney mengatakan pemerintah AS memang telah menyiapkan langkah tersebut dalam beberapa bulan terakhir.

"Hal itu menempatkan kami pada posisi di mana, sekali lagi, kami masih akan memiliki kesepakatan perdagangan terbaik dibandingkan mitra dagang AS lainnya," kata Carney kepada wartawan, Rabu (3/6).

Respons lebih keras datang dari Australia. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese memprotes rencana tarif tambahan AS sebesar 10 persen hingga 12,5 persen yang juga berpotensi dikenakan terhadap produk Australia.

Menurut Albanese, kebijakan tarif tersebut bertentangan dengan prinsip perdagangan bebas yang selama ini menjadi dasar hubungan ekonomi kedua negara.

"Ada perbedaan ideologi di mana

pemerintah Amerika Serikat telah melanggar kesepakatan yang telah berjalan selama puluhan tahun - bahwa tarif tidak memberikan dampak positif bagi negara yang menerapkannya," ujar Albanese seperti dikutip ABC, Kamis (4/6).

Ia menegaskan bahwa tarif apa pun yang dikenakan terhadap ekspor Australia ke AS merupakan tindakan yang tidak sejalan dengan perjanjian perdagangan bebas atau Free Trade Agreement (FTA) yang telah mengikat kedua negara.

"Tarif apa pun yang dikenakan pada ekspor Australia ke AS adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan dan tidak konsisten dengan perjanjian perdagangan bebas (FTA) yang mengikat kedua negara sekutu tersebut," tegasnya.

Albanese juga menilai tarif justru akan membebani masyarakat negara yang menerapkannya.

"Tarif tersebut justru meningkatkan biaya barang dan jasa bagi konsumen di negara yang menerapkannya... padahal perdagangan bebas adalah demi kepentingan ekonomi global," ujarnya..(gus,abc,ist/dya)

barang hasil kerja paksa secara memadai.

Secara rinci, USTR mengusulkan tarif tambahan 10 persen untuk barang impor dari Kanada, Ekuador, Uni Eropa, Indonesia, Meksiko, Pakistan, Argentina, Bangladesh, Kamboja, El Salvador, Guatemala, Malaysia, Taiwan, dan Inggris.

Menanggapi hal tersebut, Haryo menegaskan bahwa Indonesia tetap berkomitmen terhadap penghormatan hak asasi manusia, perlindungan pekerja, serta penerapan standar ketenagakerjaan internasional.

"Merespons pengumuman USTR yang dikeluarkan pada 2 Juni 2026, selanjutnya Pemerintah Indonesia akan mengambil langkah-langkah yang disiapkan oleh USTR termasuk sesi lanjutan untuk written comment dan public hearing," katanya.

Pemerintah juga berencana mengikuti seluruh tahapan yang disediakan USTR, termasuk menyampaikan tanggapan tertulis (written comment) dan berpartisipasi dalam dengar pendapat publik (public hearing).(wid,ist,ktn/dya)

USAI SKANDAL KORUPSI MBG, DPR RAMAI-RAMAI BERI USULAN KE BGN

Kasus dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjerat tiga mantan petinggi Badan Gizi Nasional (BGN) mendapat sorotan DPR RI. Sejumlah pimpinan dan anggota parlemen ramai-ramai menyampaikan usulan perbaikan. Mereka menekankan pentingnya pembenahan tata kelola BGN. Pengawasan anggaran juga diminta diperketat. Selain itu, DPR menyoroti perlunya penataan ulang prioritas belanja di lembaga yang menjalankan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan DPR akan memperketat pengawasan terhadap tata kelola BGN, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, hingga audit pascapelaksanaan.

"DPR pasti akan terus meningkatkan pengawasan mengenai audit tata kelola BGN sendiri di internal seperti apa, termasuk proses perencanaan, proses penganggaran sampai di ujung post audit," kata Cucun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6).

Menurutnya, evaluasi terhadap tata kelola BGN akan menjadi bagian dari pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) dalam penyusunan APBN 2027.

"Nanti Komisi IX akan melakukan evaluasi sekaligus pembahasan RKA-KL untuk anggaran APBN 2027 pasti akan dibahas terkait audit tata kelola di BGN itu sendiri," ujarnya.

Cucun menilai penguatan audit



Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang dalam konferensi pers, di Gedung BGN Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2026)

dan pengawasan internal memang diperlukan. Ia mengingatkan bahwa setiap lembaga negara telah memiliki instrumen pengawasan, termasuk inspektorat internal dan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Ya jelas perlu. Kan semua dalam negara ini sudah ada fungsi masing-masing. Pengawasan di DPR, di internal mereka punya inspektoratnya ya, pengawas internal. Apalagi DPR

kan punya catatan misalkan dari Badan Pemeriksa Keuangan yang harus dibahas catatan-catatan penting terkait tadi misalkan temuan-temuan yang ada,"katanya.

Meski demikian, DPR tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Cucun menyatakan dukungannya terhadap upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

PERUBAHAN NASIB DADAN HINDAYANA DALAM 48 JAM

- 1 JUNI, SEKITAR 15.15 WIB
Pulang haji
- 2 JUNI, 7.00 WIB
Masuk kantor BGN
- 2 JUNI, 9.30 WIB
Dampingi Presiden tinjau SPPG
- MALAM 2 JUNI
Dicipot Presiden dari jabatan Kepala BGN
- PAGI 3 JUNI
Gedung BGN digeledah kejakung
- PAGI 3 JUNI
Dijemput penyidik kejakung
- SORE 3 JUNI
Ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di rutan salemba



Kejagung: SPPG yang Terafiliasi Dadan Cs Tetap Beroperasi

KEJAKSAAN Agung (Kejagung) menegaskan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memiliki keterkaitan dengan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dan pihak terkait lainnya tidak otomatis dihentikan dari pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Syarif Sulaeman Nahdi, menyatakan bahwa operasional SPPG yang masih memberikan layanan kepada masyarakat tetap berjalan meskipun sedang dilakukan penyidikan.

"Selama SPPG itu memang apa namanya sedang melayani masyarakat, itu tidak akan kita hentikan aktivitasnya," ujar Syarif dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (4/6).

Menurutnya, tindakan penyitaan dalam proses penyidikan hanya ditujukan pada barang bukti yang berkaitan langsung dengan dugaan

tindak pidana, termasuk dokumen perizinan. Karena itu, tidak ada keharusan menyita fasilitas SPPG secara fisik.

"Jadi penyitaan itu adalah barang bukti yang akan kita gunakan sebagai bukti adanya tindak pidana. Jadi bukti tindak pidana itu bisa dokumen, bisa yang lain-lain. Jadi belum tentu SPPG," tuturnya.

Sebelumnya, Kejagung menetapkan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, serta Lodewyk Pusung sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program MBG.

Dalam penyidikan tersebut, Syarif menjelaskan bahwa semestinya program MBG dijalankan melalui yayasan yang berafiliasi dengan sekolah penerima manfaat. Namun dalam praktiknya, sejumlah SPPG justru ditunjuk karena memiliki hubungan dengan petinggi BGN. Ia juga menyebut yayasan-

yayaan tersebut tidak memenuhi syarat sebagai mitra SPPG.

Selain itu, penyidik menemukan adanya praktik mark-up dalam sejumlah pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara dan tidak mendukung pelaksanaan program MBG secara optimal.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang, menyatakan bahwa Wakil Kepala BGN yang baru, Mayjen Trenggono, akan mengundurkan diri dari Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Menurut Nanik, proses pengunduran diri tersebut saat ini sedang berjalan.

"Sudah diajukan proses pengunduran diri dan mungkin dalam waktu dekat beliau sudah pensiun, Tapi proses pengunduran dirinya sudah dilakukan berlangsung sejak kemarin," kata Nanik di Kantor BGN, Jakarta, Kamis (4/6). (tin,ist/dya)

"Menegenai mekanisme proses hukum, kita hormati yang sedang dijalankan oleh kejaksaan terkait BGN, oleh KPK terkait di Imigrasi. Kita hormati semua proses yang ada dan kita apresiasi spirit pemerintah Bapak Presiden dalam penegakan hukum memberantas korupsi," ujarnya.

Ia juga berharap pimpinan baru BGN mampu menjalankan mandat Presiden dengan lebih baik setelah mencuatnya kasus tersebut.

"Harapannya bagaimana pimpinan BGN betul-betul menjaga amanat presiden dan bisa menjalankan semua apa yang diharapkan untuk percepatan target daripada BGN ini," kata Cucun.

Sorotan serupa datang dari Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah. Ia menekankan bahwa kasus yang menjerat mantan pimpinan BGN harus menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola lembaga.

"Saya sampaikan, apa yang terjadi di BGN, kita tahu bersama, itulah yang saya maksud, perbaiki tata kelola," ujar Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. (wid,rls,ant/dya)

TEROBOS JALUR ILEGAL, PENDAKI 18 TAHUN TERJATUH KE JURANG 300 M DI SEMERU

Suara dentuman keras memecah ketenangan Kompleks Perikanan, Kelurahan Fandoi, Distrik Biak Kota, Minggu (31/5/2026) siang. Sekitar pukul 14.45 WIT, ledakan besar tiba-tiba mengguncang kawasan permukiman itu, disusul kepulan asap tebal dan kepanikan warga yang berhamburan menyelamatkan diri. Peristiwa itu diduga berasal dari bom atau mortir peninggalan Perang Dunia II yang selama ini terpendam di bawah salah satu rumah panggung warga.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, korban merupakan bagian dari rombongan tiga pendaki asal Semarang, Pasuruan, dan Malang yang nekat memasuki kawasan Semeru melalui akses yang bukan merupakan jalur resmi pendakian.

Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB TNBTS), Rudijanta Tjahja Nugraha, menegaskan bahwa aktivitas pendakian yang dilakukan korban tidak tercatat dalam sistem pelayanan pendakian yang dikelola pihak taman nasional.

"Jalur yang digunakan bukan merupakan jalur resmi pendakian wisata yang dikelola BB TNBTS. Masyarakat setempat juga mengetahui bahwa jalur tersebut bukan merupakan pintu masuk maupun jalur yang digunakan untuk aktivitas pendakian Gunung Semeru,"



Cakra (18), pendaki ilegal yang alami kecelakaan saat dievakuasi oleh tim gabungan di lereng Gunung Semeru. (Dok. BB TNBTS)

ujar Rudijanta.

Ia mengingatkan masyarakat agar tidak memasuki kawasan Gunung Semeru melalui jalur tidak resmi maupun melakukan aktivitas pendakian selama penutupan masih diberlakukan akibat aktivitas vulkanik

gunung tersebut. Menurutnya, pendakian ilegal tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga berisiko tinggi terhadap keselamatan pendaki dan menyulitkan proses penyelamatan ketika terjadi keadaan darurat.

Rudijanta menjelaskan, insiden bermula pada Senin (1/6) sekitar pukul 10.00 WIB ketika korban

menghubungi orang tuanya dan meminta pertolongan setelah terjatuh di lereng Gunung Semeru.

"Korban sempat mengirimkan koordinat lokasi terakhirnya sebelum komunikasi terputus," katanya.

Setelah menerima kabar tersebut, keluarga korban berkoordinasi dengan Koramil Tirtoyudo dan Koramil Ampelgading untuk melakukan pencarian. Pada Senin malam sekitar pukul 22.00 WIB, ayah korban bersama enam warga setempat memulai upaya pencarian.

"Untuk mencapai lokasi menempuh perjalanan sekitar delapan jam berjalan kaki melewati medan yang terjal, curam, dan minim akses," ungkap Rudijanta.

Korban akhirnya ditemukan pada Selasa (2/6) sekitar pukul 10.00 WIB. Namun, proses evakuasi tidak bisa segera dilakukan karena kondisi medan yang sangat berat dan berbahaya. Tim kemudian menambah personel dari masyarakat Tamansatriyan, Tamansari, dan Tlogosari untuk memperkuat operasi penyelamatan.

"Tim gabungan yang terdiri dari petugas BB TNBTS, Basarnas, warga setempat, dan relawan juga bergerak membantu untuk membawa korban turun menuju posko evakuasi," ujarnya.

Untuk mempercepat proses penyelamatan, Kantor SAR Surabaya mengirimkan satu tim tambahan yang dilengkapi peralatan khusus penyelamatan medan terjal. Kepala Kantor SAR Surabaya, Nanang Sigit P.H., mengatakan tim tambahan membawa peralatan High Angle Rescue Technique (HART) dan perangkat komunikasi satelit Starlink.

"Tim tambahan diberangkatkan untuk mendukung SAR gabungan. Mereka membawa tambahan peralatan High Angle Rescue Technique (HART) serta perangkat Starlink untuk mempermudah akses komunikasi antarpersonel di lapangan yang susah sinyal," ujar Nanang, Kamis (4/6).

Sementara itu, Koordinator Unit Siaga SAR (USS) Malang, Imam Nahrowi, menjelaskan bahwa operasi penyelamatan sempat dihentikan pada malam hari karena cuaca buruk dan jarak pandang yang sangat terbatas.

"Perjalanan menuju tebing kemarin malam terpaksa dihentikan karena pandangan tertutup kabut. Berisiko sangat tinggi bila perjalanan dilanjutkan dalam kondisi seperti itu," jelas Imam.

Operasi kemudian dilanjutkan kembali pada Kamis pagi. Dari titik terakhir yang masih dapat diakses kendaraan roda empat, tim SAR harus berjalan kaki sekitar delapan jam untuk mencapai lokasi korban. (san,ist,ant/dya)

Gunung Semeru erupsi dengan tinggi letusan 700 meter di atas puncak pada Kamis (4/6/2026) pagi. PVMBG



Semeru Erupsi Tujuh Kali dalam 8 Jam

permukaan laut (mdpl)," kata Sigit, Kamis (4/6/2026).

Menurut dia, kolom abu hasil erupsi berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal dan bergerak ke arah barat daya. Letusan tersebut terekam pada seismograf dengan amplitudo maksimum 21 milimeter dan durasi 124 detik. Selain aktivitas erupsi yang terlihat di permukaan, pengamatan kegempaan juga menunjukkan peningkatan aktivitas di tubuh gunung api tertinggi di Pulau Jawa itu. Dalam periode enam jam, yakni pukul 00.00 hingga 06.00 WIB, petugas mencatat 16 kali gempa letusan atau erupsi dengan amplitudo 12-22 milimeter dan durasi gempa 51-142 detik.

"Kemudian tiga kali gempa embusan dengan amplitudo 3-7 mm, dan lama gempa 47-49 detik, serta

satu kali gempa tektonik jauh dengan amplitudo 34 mm, S-P 20 detik dan lama gempa 78 detik," ujar Sigit.

Hingga saat ini, aktivitas vulkanik Gunung Semeru masih berada pada Status Level III atau Siaga. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) tetap memberlakukan sejumlah rekomendasi bagi masyarakat untuk menghindari kawasan rawan bencana.

Masyarakat dilarang melakukan aktivitas apa pun di sektor tenggara sepanjang Besuk Kobokan hingga jarak 13 kilometer dari puncak atau pusat erupsi. Selain itu, warga juga diminta tidak beraktivitas dalam radius 500 meter dari tepi sungai di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terdampak perluasan awan panas dan aliran lahar hingga sejauh 17 kilometer dari puncak. (wid,ist/dya)

NOEL TERIMA VONIS 4,5 TAHUN TANPA PERLAWANAN

Perjalanan politik Immanuel "Noel" Ebenezer Gerungan mencapai titik paling kelam ketika Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis penjara terhadap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) periode 2024–2025 itu.

Noel dinyatakan terbukti terlibat dalam perkara suap dan gratifikasi terkait pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Dalam sidang yang digelar pada Kamis (4/6/2026), majelis hakim yang dipimpin Nur Sari Baktiana memutuskan Noel bersalah dan menjatuhkan hukuman 4 tahun 6 bulan penjara.

Selain pidana badan, ia juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp200 juta. Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 90 hari.

Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel "Noel" Ebenezer Gerungan, divonis 4 tahun 6 bulan penjara dalam kasus suap dan gratifikasi pengurusan sertifikat K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat juga menjatuhkan denda Rp200 juta dan uang pengganti Rp3,435 miliar. Noel menerima putusan tersebut dan mengakui perbuatannya. Sementara itu, Jaksa KPK masih mempertimbangkan langkah hukum berikutnya atas vonis yang lebih ringan dari tuntutan 5 tahun penjara.



Eks Wamenaker Immanuel Ebenezer usai menjalani sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (4/6/2026). ist

Berbeda dengan banyak terdakwa kasus korupsi yang umumnya memilih menempuh upaya hukum lanjutan, Noel justru menerima putusan tersebut secara terbuka. Di hadapan majelis hakim, ia mengakui perbuatannya dan menyatakan

menerima hukuman yang dijatuhkan.

"Terima kasih Yang Mulia, saya anggap hukuman yang diberikan majelis sesuai dengan kejahatan yang saya lakukan, jadi dengan ini saya terima Yang Mulia," ujar Noel setelah mendengarkan pembacaan amar

putusan.

Ketua Majelis Hakim kemudian memastikan kembali sikap Noel terhadap putusan tersebut.

Hakim: "Saudara menerima putusan?"

Noel: "Iya."

Pernyataan tersebut menandai berakhirnya proses persidangan dari sisi terdakwa. Namun perkara belum berkekuatan hukum tetap (inkrah) karena Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menyatakan pikir-pikir atas putusan tersebut.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menguraikan secara rinci praktik suap yang terjadi dalam pengurusan sertifikasi K3 bagi Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3). Noel terbukti menerima aliran dana yang disebut sebagai "uang nonteknis" untuk mempermudah proses sertifikasi tersebut.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Noel menerima suap dari Irvian Bobby Mahendro, seorang aparat sipil negara yang dikenal dengan julukan "Sultan" Kemnaker. Bentuk suap yang diterima berupa uang tunai sebesar Rp3 miliar dan satu unit sepeda motor Ducati Scrambler berwarna biru dongker.

Selain suap, hakim juga menyatakan Noel terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp435 juta dari pihak swasta. Gratifikasi tersebut tidak pernah dilaporkan kepada KPK sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Atas perbuatan tersebut, majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp3.435.000.000. Namun karena Noel telah mengembalikan uang senilai Rp3 miliar pada tahap penyidikan, jumlah tersebut diperhitungkan sebagai pengurang kewajiban pembayaran.

Majelis hakim juga menegaskan bahwa apabila dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap Noel tidak membayar sisa uang pengganti, maka jaksa berwenang menyita dan melelang harta bendanya. Jika hasil penyitaan tidak mencukupi, Noel akan menjalani tambahan pidana penjara selama 1 tahun. (tin,rls,ant,kum/dya)

RINCIAN GRATIFIKASI RP435 JUTA YANG DITERIMA NOEL:

- **21 Oktober 2024:** menerima Rp30 juta dari Arsul.
- **17 November 2024:** menerima Rp25 juta dari Aji Jaya Bintara, Direktur PT Stramanta Dinamika Interkapital.
- **15 Desember 2024:** menerima Rp50 juta dari Yohanes Permata F, Komisaris PT Energi Kita Merah Putih.
- **25 Desember 2024:** menerima Rp50 juta dari Yohanes Permata F, Komisaris PT Energi Kita Merah Putih.
- **27 Februari–23 Mei 2025:** menerima Rp200 juta dari Raden Muhammad Zidni.
- **22–27 Maret 2025:** menerima Rp80 juta dari Yeni Marlina.

WAKIL Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan seluruh petugas haji 2027 wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) di barak guna memberikan kualitas pelayanan yang lebih prima kepada jamaah haji Indonesia.

"Ke depan kami pastikan semua petugas harus mengikuti pelatihan. Pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa kualitas layanan sangat dipengaruhi oleh kesiapan petugas sebelum bekerja," kata Dahnil di Makkah, Rabu (3/6).

Kewajiban mengikuti pelatihan tersebut berlaku komprehensif bagi

Komentari Korupsi MBG: Memprihatinkan

seluruh unsur tanpa terkecuali, mulai dari Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi, Petugas Haji Daerah (PHD), hingga petugas kloter dan embarkasi.

Kebijakan tersebut diharapkan mampu menutup kesenjangan keterampilan antara petugas yang direkrut secara nasional maupun daerah.

Sebagai wujud komitmen pemerintah dalam meningkatkan pelayanan dan kenyamanan jamaah, Kementerian Haji dan Umrah juga akan melakukan inovasi struktural dengan membentuk Daerah Kerja (Daker) Armuzna secara khusus pada operasional haji 2027.

Dahnil menjelaskan, satuan kerja baru tersebut akan berfokus penuh menangani seluruh operasional di titik-titik krusial, yakni kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

"Ke depan kami akan membentuk Daker Armuzna yang memang secara khusus bertugas hanya di Armuzna," ujar Dahnil.

Dengan adanya unit khusus tersebut, petugas yang ditempatkan tidak lagi dibebani tugas tambahan di sektor lain.

Mereka dapat memusatkan seluruh tenaga dan perhatiannya untuk mengawal kelancaran pergerakan serta memastikan keselamatan jutaan jamaah pada fase puncak ibadah haji.

Inovasi dan perbaikan kapasitas petugas itu merupakan hasil evaluasi positif dari penyelenggaraan haji 2026. Persiapan matang yang dilakukan lebih awal diyakini menjadi kunci utama untuk menghadirkan penyelenggaraan haji yang semakin tertib, profesional, dan berorientasi penuh pada keselamatan jamaah. (tin,rla,ant/dya)

Masih 21% Wilayah Kabupaten Malang Blank Spot

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Malang, Atsalis Supriyanto. (foto: Prokopim Kab. Malang)



masyarakat, saat ini hampir 80 hingga 85 persen wilayah sudah terjangkau akses internet," ujar Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Malang, Atsalis Supriyanto, Kamis (4/6/2026).

Menurutnya, upaya menghapus blank spot secara menyeluruh belum dapat dilakukan dalam waktu cepat karena terbentur

keterbatasan anggaran daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah mendorong skema kolaborasi dengan sektor swasta melalui pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang dapat digunakan bersama.

Salah satu solusi yang tengah didorong adalah pembangunan tower bersama di kawasan yang selama ini sulit dijangkau sinyal. Skema tersebut dinilai lebih efektif karena satu menara dapat dimanfaatkan oleh beberapa

operator telekomunikasi sekaligus.

"Sedapat mungkin dilakukan pemasangan tower bersama di kawasan blank spot. Keberadaan tower tersebut dapat dimanfaatkan oleh berbagai provider untuk memperluas jangkauan layanan sampai wilayah yang selama ini belum terlayani," jelasnya.

Kondisi tersebut menjadi perhatian serius DPRD Kabupaten Malang. Selain menghambat aktivitas masyarakat, keterbatasan jaringan internet dinilai berpotensi menghambat pengembangan sektor wisata dan pelayanan publik di sejumlah wilayah terpencil.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Malang, Amarta Faza, mengaku telah memanggil Diskominfo untuk membahas secara khusus persoalan blank spot yang masih terjadi di sejumlah wilayah.

Dinilainya masih banyak kawasan potensial yang belum mendapatkan layanan internet memadai, terutama wilayah pegunungan dan kawasan pesisir yang menjadi destinasi wisata unggulan Kabupaten Malang.

"Masih ada banyak wilayah blank spot. Ini harus segera ditangani. Apalagi banyak wilayah tersebut memiliki

potensi wisata, terutama di pegunungan dan pantai," kata Amarta.

Politikus Nasdem tersebut menambahkan, keluhan terkait sulitnya akses internet masih sering disampaikan masyarakat maupun pelaku wisata. Padahal, konektivitas digital saat ini menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung promosi destinasi, transaksi digital, hingga keamanan wisatawan.

Karena itu, DPRD mendorong Diskominfo memanfaatkan data pemetaan wilayah blank spot yang telah dimiliki sebagai bahan negosiasi dan kerja sama dengan perusahaan penyedia layanan telekomunikasi.

Langkah tersebut diharapkan dapat menarik minat investasi pembangunan infrastruktur jaringan di wilayah yang selama ini dianggap kurang menguntungkan secara bisnis.

"Diskominfo harus memanfaatkan data pemetaan wilayah blank spot sebagai dasar kerja sama dengan para provider. Harapannya, data itu bisa ditawarkan kepada provider supaya mereka berinvestasi membangun tower bersama untuk memaksimalkan jangkauan sinyal," terangnya. (Santi/Dya)

MALANG- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang mengakui masih memiliki pekerjaan rumah (PR) besar dalam pemerataan akses digital. Hingga saat ini, sekitar 21 persen wilayah tersebut masih masuk kategori blank spot atau belum terjangkau layanan internet secara optimal.

"Untuk blank spot yang ada di wilayah Kabupaten Malang sampai saat ini masih sekitar 21 persen. Dengan adanya jasa internet yang dilakukan oleh pihak tertentu maupun

DPRD Tagih Pemkot Segera

Tuntaskan Persoalan Pasar Tawangmangu

MALANG - DPRD Kota Malang menagih tindak lanjut Pemerintah Kota (Pemkot) untuk menuntaskan berbagai persoalan di Pasar Tawangmangu.

Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Reko Aji, menyebut rekomendasi penanganan telah disampaikan sejak tahun lalu melalui rapat dengar pendapat (RDP) bersama sejumlah perangkat daerah terkait, namun hingga kini kondisi pasar tradisional tersebut dinilai belum mengalami perubahan.

"Waktu itu ada aduan pedagang Pasar Tawangmangu, kami sudah panggil Diskopindag, DLH juga karena disitu ada taman pemakaman, kemudian Satpol PP, dan Dishub. Dari situ rekomendasi sudah kami kirimkan langsung ke Pemkot sebenarnya," ujar Bayu, Kamis (4/6/2026).

Dijelaskannya, salah satu persoalan utama yang dikeluhkan pedagang adalah semakin sepi aktivitas jual beli di dalam pasar. Kondisi tersebut diperparah dengan menjamurnya PKL yang berjualan di sepanjang ruas jalan sekitar pasar.

Bayu menilai, fenomena tersebut

tidak sesederhana keberadaan PKL pada umumnya. Sebab, sebagian PKL yang berjualan di luar pasar merupakan pedagang resmi Pasar Tawangmangu yang memilih keluar dari kios maupun los karena merasa dagangannya tidak berkembang ketika tetap bertahan di dalam pasar.

"Kondisi seperti ini kasihan bagi pedagang yang tetap bertahan di dalam pasar," katanya.

Menurut Bayu, terdapat persaingan yang tidak seimbang antara pedagang yang berada di dalam pasar dengan pedagang yang berjualan di luar area pasar.

"Kadang pasar itu sepi bukan karena tidak laku, tetapi karena kalah saingan dengan PKL. Ini yang menurut kami cukup miris," ungkapnya.

Bayu menilai, munculnya PKL di sekitar pasar juga tidak lepas dari perubahan perilaku masyarakat dalam berbelanja. Sebagian masyarakat di Kota Malang cenderung memilih lokasi yang lebih mudah dijangkau tanpa harus masuk ke area pasar maupun mencari tempat parkir.

"Mungkin memang ada faktor

kebiasaan masyarakat yang ingin lebih praktis dengan drive thru, tidak ingin parkir dan masuk ke pasar. Akhirnya dua kepentingan itu bertemu dan muncul kondisi seperti sekarang," jelasnya.

Meski demikian, Bayu menegaskan Pemkot Malang tetap memiliki tanggung jawab sebagai

regulator untuk menata kawasan pasar dan menegakkan aturan yang berlaku.

Diharapkannya, rekomendasi yang telah diberikan DPRD dapat segera ditindaklanjuti agar keberadaan PKL dan aktivitas perdagangan di dalam pasar dapat berjalan lebih seimbang.

Selain persoalan penataan pedagang, DPRD juga terus mendesak percepatan revitalisasi Pasar Tawangmangu. Pasar tersebut diketahui menjadi satu-satunya pasar tradisional di Kota Malang yang belum



tersentuh revitalisasi dalam kurun waktu hampir 40 tahun.

Di awal 2026 lalu, DPRD Kota Malang mengungkapkan Detail Engineering Design (DED) revitalisasi Pasar Tawangmangu telah rampung disusun.

Dokumen tersebut bahkan telah diajukan kepada Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri sebagai dasar usulan bantuan pendanaan dari pemerintah pusat. (Santi/Dya)

KORUT UNGKAP FASILITAS BARU PENGAYAAN URANIUM, GENJOT PRODUKSI SENJATA NUKLIR

Pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong Un, secara resmi memperkenalkan fasilitas produksi uranium baru yang ditujukan untuk memperkuat persenjataan nuklir negara tersebut. Dalam kunjungan yang berlangsung pada awal Juni 2026, Kim menegaskan bahwa kapasitas produksi material nuklir tingkat senjata di negaranya telah meningkat lebih dari dua kali lipat dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Meskipun lokasi pastinya masih dirahasiakan, media pemerintah KCNA dikutip Kamis (4/6) melaporkan bahwa pabrik ini mengadopsi "teknologi yang lebih canggih."

Sejumlah poin utama terkait fasilitas ini meliputi ruang sentrifus. Foto yang dirilis menunjukkan deretan sentrifugal silinder untuk pengayaan uranium ke tingkat senjata.

Selanjutnya, hulu ledak baru. Analisis dari Forum Pertahanan dan Keamanan Korea (KODEF), Shin Jong-woo, menduga adanya desain hulu ledak generasi terbaru yang berbeda dari bom hidrogen sebelumnya.

Hal ini sejalan dengan laporan Direktur Jenderal IAEA, Rafael Grossi, yang mengonfirmasi adanya "peningkatan aktivitas yang cepat" di situs nuklir Korut sejak April lalu.

Kim Jong Un menyatakan bahwa pengembangan ini merupakan langkah krusial untuk menghadapi tekanan dari Amerika Serikat dan



Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un melihat-lihat pabrik produksi material nuklir baru pada 3 Juni 2026, menurut media pemerintah KCNA. (Dok.KCNA)

sekutunya. Ia menyebut senjata nuklir sebagai "jaminan utama" bagi keamanan nasional.

"Rencana masa depan Korut yang ambisius ini dirancang untuk memperkuat kekuatan nuklir kami dengan laju eksponensial," tegas Kim Jong Un seperti dikutip dari Reuters dan KCNA.

Ia juga menambahkan bahwa penguatan persenjataan ini adalah bentuk pertahanan diri menghadapi musuh yang ia labeli sebagai:

"Musuh yang paling ganas."

Langkah provokatif ini diambil di tengah rentetan uji coba rudal yang dilakukan sepanjang tahun 2026. Korea Utara tetap mengabaikan

berbagai sanksi internasional dari PBB, dengan menegaskan bahwa jalur kepemilikan senjata nuklir adalah ketetapan yang "tidak dapat diubah."

Peningkatan fasilitas nuklir ini diduga berlokasi di wilayah Yongbyon, yang selama ini menjadi pusat pengembangan nuklir utama mereka, meskipun spekulasi lain mengarah pada situs rahasia di Kangson atau Kusong. (gus,rtr,kcna/dya)

RUDAL APA YANG DIMILIKI KORUT?

Jarak maksimum dalam kilometer (ribu)

TERUJI / DIOPERASIKAN

Hwasong 5/6

Jarak Maksimum: 1.000 km

Pukguksong

Jarak Maksimum: 1.000 km

Nodong

Jarak Maksimum: 1.300 km

Musudan

Jarak Maksimum: 3.500 km

TAHAP PENGEMBANGAN

KN-14

Jarak Maksimum: 10.000 km

KN-08

Jarak Maksimum: 11.500 km



ancaman Korea Utara. Namun di sisi lain, pelabelan militeristik yang provokatif terhadap Tiongkok berisiko merusak hubungan ekonomi dan diplomatik mereka dengan Beijing.

Kantor Kepresidenan Korea Selatan menyatakan telah mengetahui pernyataan tersebut dan terus menjaga komunikasi di berbagai tingkatan. Namun, laporan dari media lokal seperti News1 dan JTBC mengonfirmasi bahwa Seoul secara tertutup telah menyampaikan kekhawatiran mereka kepada Washington mengenai dampak negatif yang mungkin timbul dari pemilihan diksi sang jenderal. (gus,rtr,kcna/dya)

Jenderal AS sebut Korsel Belati di Jantung Asia

Pernyataan Komandan Pasukan Amerika Serikat di Korea (USFK), Jenderal Xavier Brunson, mengenai reposisi strategis Korea Selatan (Korsel) dalam peta keamanan Asia Timur memicu gelombang protes diplomatik yang luas. Dalam sebuah wawancara yang diterbitkan oleh Strategic Studies Institute dari US Army War College, Brunson memberikan gambaran teknis-geopolitis yang memicu kemarahan Pyongyang dan keberatan serius dari Beijing.

Jenderal Brunson menyatakan bahwa secara geografis, Korea Selatan menempati posisi yang sangat krusial jika dilihat dari sudut pandang pesisir timur Tiongkok. Ia menyebut posisi tersebut sebagai "belati di jantung Asia" yang secara strategis mengarah ke pusat kepentingan Tiongkok. Sementara Jepang ia gambarkan sebagai "perisai" yang berfungsi sebagai penahan ambisi regional Beijing.

Pernyataan ini segera ditafsirkan oleh para analis sebagai sinyal pergeseran peran USFK yang tidak lagi sekadar membendung Korea Utara,

tetapi juga menjadi instrumen pengepungan terhadap kekuatan Tiongkok.

Reaksi Keras Pyongyang -Beijing

Korea Utara, melalui kantor berita resmi KCNA, langsung merespons dengan nada tinggi. Analisis Kim Myong Chol, yang dikenal sebagai juru bicara informal Pyongyang untuk urusan luar negeri, menuduh Washington sedang mempertontonkan wajah aslinya sebagai penghasut perang. Kim menyatakan bahwa Amerika Serikat adalah "pemimpin pengganggu perdamaian dan kekaisaran perang terburuk di dunia."

Menurut Kim Myong Chol, pernyataan Brunson menunjukkan bahwa Washington secara pragmatis menggunakan Seoul sebagai instrumen geopolitik demi mencapai agenda regional yang berorientasi pada pembatasan pengaruh Beijing.

Bagi Pyongyang, keterlibatan militer AS di semenanjung dengan penempatan sekitar 28.500 personel adalah ancaman eksistensial yang kini cakupannya meluas hingga ke urusan

aliansi mereka dengan Tiongkok.

"Pernyataan Brunson menunjukkan bahwa AS berupaya menjadikan Seoul sebagai instrumen penting dalam strategi kawasan yang berorientasi pada pembatasan pengaruh Beijing," lapor KCNA.

Di Beijing, reaksi pemerintah tidak kalah tajam. Kedutaan Besar Tiongkok di Seoul mengeluarkan pernyataan resmi yang menyebut komentar Brunson telah "melewati batas" serta sarat dengan sikap permusuhan dan agresif.

Beijing mempertanyakan apakah narasi "belati" tersebut telah melalui koordinasi resmi dengan Gedung Putih atau merupakan inisiatif sepihak dari komando militer di lapangan. Tiongkok mengingatkan bahwa retorika semacam itu hanya akan memperkeruh situasi keamanan yang sudah rapuh di Asia Timur.

Sementara itu, Pemerintah Korea Selatan berada dalam posisi terjepit. Di satu sisi, Seoul sangat bergantung pada payung keamanan nuklir Amerika Serikat untuk menghadapi

Mengenal Diet Low Sodium yang Bikin Goo Hye Sun Turun 13 Kg

Aktoris Korea Selatan Goo Hye Sun kembali menjadi sorotan setelah perubahan fisiknya yang mencolok. Ia mengungkapkan bahwa berat badannya kini turun hingga 46 kg setelah berhasil memangkas sekitar 13 kg.

Transformasi ini ia bagikan melalui media sosial, sekaligus memperlihatkan kebiasaan diet yang ia jalani, termasuk pola makan rendah sodium yang kini juga sedang populer.

Dalam unggahannya, ia menekankan perubahan gaya hidup yang cukup disiplin. Salah satu kunci yang ia jalankan adalah membatasi asupan garam harian, atau dikenal sebagai diet rendah sodium.

Pola ini bukan hanya sekadar tren penurunan berat badan, tetapi juga dikaitkan dengan manfaat kesehatan jangka panjang.

Apa itu diet rendah sodium

Diet rendah sodium adalah pola makan yang membatasi konsumsi garam (natrium) harian untuk menjaga kesehatan tubuh dan tekanan darah.

Mengacu pada penjelasan yang dikutip dari Healthline (2/6), tubuh memang tetap membutuhkan natrium untuk keseimbangan cairan dan fungsi sel, tetapi asupan berlebihan dapat menimbulkan masalah

kesehatan.

Rekomendasi umum asupan natrium adalah tidak lebih dari 2.300 mg per hari, atau setara sekitar satu sendok teh garam. Jika dikurangi, tubuh bisa mengalami penurunan retensi cairan sehingga perut terasa lebih ringan dan tidak mudah kembung.

Tips diet ala Goo Hye Sun

Selain mengurangi garam, Goo Hye Sun juga menerapkan beberapa kebiasaan pendukung. Ia menjaga pola tidur agar tetap cukup dan teratur. Tidur yang berkualitas disebut membantu mengendalikan nafsu makan sekaligus mendukung metabolisme tubuh.

Ia juga menghindari alkohol selama program diet berlangsung. Langkah ini membantu menekan asupan kalori sekaligus mendukung proses pembakaran lemak.

Kunci lainnya adalah penerapan diet rendah sodium, yaitu dengan mengurangi makanan tinggi garam dan lebih banyak mengonsumsi makanan segar.

Manfaat diet rendah sodium

Diet rendah sodium tidak hanya berpengaruh pada berat badan, tetapi juga membantu menjaga tekanan darah tetap stabil. Pola makan ini dinilai baik untuk kesehatan jantung dan ginjal karena mengurangi beban kerja organ dalam mengatur cairan tubuh.

Beberapa studi juga menunjukkan bahwa konsumsi garam berlebihan dapat berdampak pada kesehatan lambung. Karena itu, pengurangan sodium dianggap bisa menurunkan risiko gangguan tersebut.

Cara menjalankan diet rendah sodium

Diet ini dapat dimulai dari memilih bahan makanan segar seperti sayur, buah, dan daging tanpa p r o s e s

pengawetan. Makanan segar umumnya memiliki kandungan sodium lebih rendah dibanding makanan olahan.

Saat membeli produk kemasan, penting untuk membaca label gizi dan memilih yang rendah sodium. Penggunaan saus, bumbu instan, serta makanan olahan juga perlu dibatasi karena biasanya tinggi garam.

Selain itu, mengurangi penggunaan garam saat memasak serta menghindari makanan seperti makanan kalengan, sosis, ikan asin, dan keju dapat membantu menjaga asupan natrium tetap rendah.

Diet rendah sodium bukan sekadar metode penurunan berat badan, tetapi lebih pada upaya menjaga keseimbangan tubuh jangka panjang. Dengan mengatur asupan garam harian, tubuh bisa terasa lebih ringan karena berkurangnya retensi air, tekanan darah menjadi lebih stabil, dan risiko gangguan kesehatan serius seperti stroke serta penyakit jantung dapat ditekan secara signifikan.

Selain itu, membatasi sodium juga membantu meringankan beban kerja ginjal dalam menyaring racun dari dalam darah. Namun, seperti pola diet lainnya, konsistensi dan keseimbangan nutrisi tetap menjadi kunci utama. (ist/dya)



Panduan Konsumsi Harian yang Aman

Kondisi Tubuh	Rekomendasi Natrium Maksimal	Setara Garam Dapur
Orang Dewasa Sehat	2.000 mg / hari	1 sendok teh
Penderita Hipertensi Ringan	1.000 - 1.200 mg / hari	½ sendok teh
Hipertensi Berat / Edema Kronis	200 - 400 mg / hari	Tanpa garam tambahan

AC PORTABEL REON ROCKET PRO PLUS, DINGINKAN TUBUH HINGGA 15 JAM

Sony kembali memperluas lini perangkat wearable pengatur suhu tubuh lewat peluncuran Reon Pocket Pro Plus, perangkat pendingin portabel yang dikenakan di area belakang leher untuk membantu pengguna tetap nyaman saat beraktivitas di tengah cuaca panas. Produk ini menjadi generasi terbaru dari seri Reon Pocket yang pertama kali dikembangkan Sony di Jepang sejak 2019 dan kini mulai dipasarkan ke Amerika Serikat.

Sony mengklaim kemampuan pendinginan Reon Pocket Pro Plus meningkat hingga 20 persen dibanding generasi sebelumnya. Pelat pendingin atau cooling plate pada perangkat ini disebut mampu menghasilkan suhu tambahan sekitar 2 derajat Celsius lebih dingin dibanding model terdahulu.

Selain berfungsi sebagai pendingin tubuh, perangkat ini juga mendukung mode pemanas sehingga tetap bisa digunakan saat cuaca dingin. Dengan demikian, Reon Pocket Pro Plus dirancang sebagai perangkat multifungsi untuk berbagai kondisi lingkungan.

Dari sisi desain, Sony melakukan sejumlah perubahan agar perangkat lebih nyaman digunakan sehari-hari. Neckband atau penyangga leher kini dibuat lebih fleksibel sehingga dapat menempel lebih stabil di bahu dan tidak mudah bergeser ketika pengguna berjalan maupun membungkuk.

Sony juga mendesain ulang

ventilasi udara panas agar posisi serta arah hembusannya dapat diatur. Pembaruan ini dilakukan supaya udara panas yang dikeluarkan perangkat tidak terperangkap di balik kerah pakaian atau jaket pengguna.

Pada bagian internal, Reon Pocket Pro Plus dibekali dua thermo-module dan sistem sensor yang dapat memantau suhu kulit pengguna secara real time. Pengaturan suhu bisa dilakukan secara manual melalui tombol fisik di sisi perangkat maupun lewat aplikasi pendamping di smartphone.

Jika terhubung dengan aplikasi, mode pintar pada perangkat ini akan otomatis menyesuaikan tingkat pendinginan atau pemanasan berdasarkan kondisi lingkungan sekitar. Teknologi tersebut membuat perangkat mampu bekerja lebih adaptif sesuai kebutuhan pengguna.

Sony turut mengklaim daya tahan baterai Reon Pocket Pro Plus dapat mencapai hingga 15 jam dalam mode smart cooling. Perangkat ini juga disebut bekerja dengan suara yang senyap sehingga tetap nyaman digunakan di kantor maupun ruangan tertutup tanpa mengganggu orang lain.

Sebagai pelengkap, Sony menghadirkan aksesori tambahan bernama Reon Pocket Tag 2 atau

Wearable Sensing Device. Sensor mungil tersebut dapat dipasang pada tas maupun sabuk celana untuk mengukur suhu dan kelembapan udara di sekitar pengguna. (Ist/dya) (Desain : Zaidan Mahasiswa Unesa)

REKOMENDASI AC MINI PORTABLE DI PASARAN

1. Wins AC Mini Portable Double Windows

- Desain dua ventilasi, arah angin bisa diatur kiri-kanan
- Mesin lebih kuat dibanding generasi awal Bisa ditambah air dingin atau es batu
- Daya via USB laptop, komputer, atau mobil
- Harga mulai Rp70 ribuan

2. Arctic Air Ultra 2X Cooling Power

- Ukuran ringkas 14 x 16 x 16 cm
- Plug and play via USB
- Kecepatan angin dapat diatur
- Tangki air 450 ml
- Tahan hingga 10 jam penggunaan

3. Handheld Mini AC

- Desain ergonomis dan mudah dibawa
- Menggunakan filter udara dan kipas
- Baterai rechargeable via USB
- Cocok untuk aktivitas mobile
- Harga sekitar Rp75 ribuan

4. Kris Air Cooler Mini

- Dimensi compact 16,1 x 13,8 x 18 cm
- Cocok untuk meja atau ruangan kecil
- Menggunakan air dingin untuk udara lebih sejuk
- Ideal untuk ruangan minimalis
- Harga sekitar Rp299 ribuan

5. DC 12 V Air Cooler

- Menggunakan sistem evaporative air conditioner Cocok dipasang di dashboard mobil
- Membantu menurunkan suhu kabin
- Menambah kelembapan dan sirkulasi udara
- Harga sekitar Rp500 ribuan



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, ARIEF SUKAPUTRA, MUHIBUDIN KAMALI

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | SIDOARJO: TEGUH A | GRESIK: ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | MOJOKERTO: NUR HIDAYAH | LAMONGAN: L HANDI | BLITAR: ARIEF SUKAPUTRA | KEDIRI: AIS | JOMBANG : SUTONO | PASURUAN-PROBOLINGGO- PONOROGO : IMAN SANTOSO | BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI: PURCAHYONO JULIATMOKO | MADIUN: WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | MALANG RAYA: SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. | TRENGGALEK: HERLAMBAH | MADURA RAYA: SAHLAN KURNIAWAN | NGAWI: DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | DKI JAKARTA: FUAD HASSAN | LOMBOK BARAT: MUHAYYAN | PALANGKA RAYA: NOVITA MASNIARI

MEDIA TERVERIFIKASI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILA
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN, FADHILA | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26, JL TENGGILIS TENGAH 4 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.



Dua Lipa dan Tren Baju Nikah Setelan yang Kembali Populer

Gaya pernikahan minimalis berbasis setelan blazer dan rok kembali mencuri perhatian setelah penyanyi Dua Lipa menikah dengan aktor Callum Turner dalam upacara intim di London.

Penampilan tersebut langsung diprediksi akan menjadi tren baru busana pengantin modern karena memadukan kesan formal, kasual, dan nonkonvensional dalam satu tampilan yang kuat secara gaya.

Minggu lalu, pasangan ini meresmikan hubungan mereka dalam sebuah acara sederhana di Old Marylebone Town Hall, London. Foto-foto yang memperlihatkan keduanya di tangga balai kota dengan hujan konfeti menjadi viral.

Sorotan utama justru tertuju pada busana pengantin Dua Lipa yang tidak berupa gaun klasik, melainkan setelan blazer dan rok warna putih gading yang disebut mengingatkan pada gaya ikonik era 1970-an.

Setelan tersebut memiliki kemiripan dengan gaya pengantin nontradisional yang dipopulerkan oleh sosialita Bianca Jagger saat menikah dengan Mick Jagger pada 1971.

Pada masa itu, pilihan busana Bianca dianggap sangat tidak konvensional, namun kini justru dipandang sebagai salah satu referensi penting dalam sejarah mode pengantin modern. Dalam beberapa tahun terakhir, gaya ini kembali muncul ke permukaan dan dikenakan ulang oleh sejumlah figur publik seperti Amal Clooney dan Emily Ratajkowski dalam versi yang lebih kontemporer.

Dalam laporan yang dikutip dari The Guardian terkait Bianca Jagger, stylist Rosie Boydell-Wiles menjelaskan alasan mengapa gaya ini terus relevan hingga sekarang.

"Penampilan pengantin terbaik dalam sejarah adalah penampilan di mana kamu dapat melihat bahwa pengantin wanita benar-benar telah memikirkan siapa dirinya, apa yang cocok untuknya, dan bagaimana ia ingin mengembarkannya ke pribadinya melalui penampilannya, terlepas dari apa yang dianggap sebagai tren,"ujarnya.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa daya tarik utama dari busana pengantin berbasis setelan bukan

sekadar estetika, tetapi juga ekspresi personal yang kuat dan tidak tunduk pada norma tradisional pernikahan.

Busana yang dikenakan Dua Lipa sendiri dirancang oleh desainer Daniel Roseberry untuk rumah mode Schiaparelli. Blazer tersebut menampilkan detail khas brand berupa kancing "evil eye" dan kepala singa, sementara korset bernuansa merah muda serta struktur pinggul yang terintegrasi memberi siluet tegas namun feminin.

Topi lebar yang melengkapi tampilan dirancang oleh milliner Inggris Stephen Jones, menambah kesan dramatis yang merujuk pada estetika retro.

Sebagai pelengkap, Dua Lipa juga mengenakan sarung tangan putih serta kalung dari Bulgari seri Serpenti, yang sebelumnya pernah ia kenakan dalam ajang Brit Awards. Kombinasi ini memperkuat citra elegan sekaligus modern dari keseluruhan tampilan pengantin.

Dari 1970-an ke red carpet modern

Jika ditarik ke belakang, tren setelan pengantin sebenarnya bukan hal baru. Era 1970-an menjadi titik penting ketika Bianca Jagger tampil dengan setelan putih tailored yang mematahkan dominasi gaun pengantin tradisional. Gaya ini kemudian menjadi simbol kebebasan perempuan dalam mendefinisikan ulang identitas pengantin.

Memasuki dekade 2010-an hingga 2020-an, tren ini kembali muncul dalam berbagai bentuk, dari suit two-



piece, jumpsuit, hingga tailored blazer untuk pernikahan sipil. Banyak desainer menafsirkan ulang gaya ini sebagai respons terhadap perubahan budaya pernikahan yang semakin personal, minimalis, dan tidak lagi terpaku pada aturan klasik.

Dalam konteks ini, penampilan Dua Lipa memperkuat siklus mode yang memang kerap berulang. Fashion pengantin modern kini tidak lagi hanya berkat pada gaun ball gown, tetapi juga setelan struktural yang memberi kesan kuat, praktis, dan relevan dengan gaya hidup urban.

Dengan sorotan media yang besar dan pengaruh budaya pop yang kuat, pilihan busana Dua Lipa diprediksi akan kembali mengangkat tren "bridal suit" ke arus utama—melanjutkan jejak panjang dari Bianca Jagger hingga reinterpretasi modern di era sekarang. (ist/dya)



Setoran Jumat: Rp100 Juta ...dari hal 1

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan praktik korupsi terstruktur dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) yang berlangsung di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi sejak 2022 hingga 2026. Dalam perkara yang menjerat Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim tersebut, penyidik menemukan adanya aliran dana rutin yang dibagikan setiap pekan kepada sejumlah pejabat, termasuk setoran sebesar Rp100 juta yang disebut diterima Silmy setiap hari Jumat.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menjelaskan, saat masih menjabat Direktur Jenderal Imigrasi pada periode 2023-2024, Silmy diduga meminta jatah dari pengurusan izin tinggal WNA melalui Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian, Jaya Saputra.

"Bahwa kemudian, dalam proses penyelidikan, Saudara SK selaku Wakil Menteri Imipas tahun 2025-2026, yang saat itu menjabat Dirjen Imigrasi tahun 2023-2024, diduga melakukan pemerasan dengan cara 'meminta jatah' dari pengurusan izin tinggal para WNA melalui Saudara JS selaku Direktur Izin Tinggal," kata Setyo dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (4/6).

Menurut KPK, permintaan tersebut kemudian diteruskan oleh Jaya Saputra kepada dua pejabat di Direktorat Izin Tinggal, yakni Bagus Bramantyo dan Tessar Bayu Setyaji. Keduanya diperintahkan menarik biaya tambahan dari para pemohon izin tinggal.

"JS kemudian memerintahkan Saudara BGS dan Saudara TBS yang keduanya selaku Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal, untuk menarik 'biaya extra' dari WNA, di mana untuk setiap dokumen permohonan izin tinggal yang diproses 'setiap klik ada harganya,'" ujar Setyo.

Istilah "setiap klik ada harganya" menjadi salah satu modus utama dalam perkara ini. Meski proses pengurusan izin tinggal telah terdigitalisasi dan berbasis sistem komputer, para pemohon maupun biro jasa disebut tetap harus mengeluarkan uang tambahan agar dokumen mereka mendapat persetujuan.

Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menjelaskan bahwa pungutan tersebut berkaitan dengan otorisasi tertentu dalam sistem keimigrasian.

"Itu sudah digitalisasi semua, itu sudah sistem komputerisasi, jadi biro jasa yang melayani WNA izin tinggal sudah lengkap, tapi karena ada tadi unsur pemaksaan dan pungli, jadi ada

istilah kepada pengurus biro jasa uang accuntuk klik," kata Taufik.

"Itu otorisasinya kenapa itu muncul pungli. Uang acc itu klik. Jadi ada semacam di komputer itu harus ada yang di klik oleh pejabat itu tadi," lanjutnya.

Untuk menjalankan skema tersebut, akses penarikan biaya tambahan kemudian melibatkan Ketua Tim Alih Status ITAS Juniadi Sri Priambudi dan staf Subdit Izin Tinggal Gusti Bernardiansyah.

Gusti diduga berperan sebagai pengelola rekening penampung dengan menggunakan sejumlah rekening nominee atau rekening atas nama pihak lain. Rekening tersebut dipakai untuk mengumpulkan uang yang berasal dari biro jasa maupun WNA yang mengurus izin tinggal.

KPK memperkirakan selama periode 2022 hingga 2026, para pihak di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kementerian Imipas menerima dana hasil praktik tersebut sedikitnya Rp145,5 miliar.

"Di mana, selama periode 2022-2026, para pihak di Dirjen Imipas/Kementerian Imipas

menerima uang secara langsung (tunai/transfer) maupun melalui layering/perantara, sekurang-kurangnya mencapai Rp145,5 miliar," kata Setyo.

Dana tersebut kemudian didistribusikan secara rutin setiap pekan, terutama pada hari Jumat. Salah satu penerima yang disebut KPK adalah Silmy Karim dengan nominal Rp100 juta setiap minggu.

"Uang tersebut, kemudian dibagikan kepada para oknum di Dirjen Imipas/Kementerian Imipas setiap pekan di hari Jumat, salah satunya Saudara SK yang menerima jatah rutin sebesar Rp100 juta per minggu," ujar Setyo.

Temuan itu juga diperkuat oleh hasil pemeriksaan saksi dan alat bukti yang dikumpulkan penyidik.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut aliran dana kepada Silmy telah berlangsung sejak yang bersangkutan masih menjadi Dirjen Imigrasi dan berlanjut ketika menjabat wakil menteri.

"Nah ini ternyata yang kita temukan sampai saat ini ya, dalam mungkin tempo 1x24 jam ini, dari keterangan

saksi-saksi, maupun dari yang bersangkutan, itu sejak dirjen berlanjut ke wamen," kata Asep.

Sementara itu, Achmad Taufik Husein menegaskan bahwa catatan penerimaan dana tersebut terekam dalam alat bukti penyidik. (wid,kum,ant/dya)

**FAKTA-FAKTA UTAMA
KASUS KORUPSI IMIGRASI**

- **Total Dana Korupsi:** KPK mengungkap aliran dana korupsi imigrasi mencapai Rp145,5 miliar sepanjang 2022-2026.
- **Modus Pemerasan:** Pungli dilakukan dalam pengurusan KITAS dan KITAP terhadap biro jasa, sponsor, dan WNA. Setoran Rutin: Diduga ada setoran Rp100 juta setiap Jumat kepada mantan Dirjen Imigrasi Silmy Karim.
- **Kode Rahasia:** Pelaku memakai kode seperti "Malaikat", "Vokalis", "Gitaris", dan "Backing Vocal" untuk pembagian uang.
- **Rekening Mencurigakan:** PPAK menemukan transaksi mencurigakan di rekening pegawai imigrasi senilai Rp357 miliar.
- **Pencucian Uang:** Dana haram diduga disamarkan melalui rekening pegawai rendahan dan perusahaan cangkang.



**Istana Belum Putuskan
Pengganti Silmy Karim**

PRESIDEN Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmy Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan (Wamen Imipas) setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan surat pemberhentian tersebut telah ditandatangani Presiden pada Kamis (4/6).

"Berkaitan dengan hal tersebut, kalau pertanyaannya apakah kemudian Bapak Presiden telah memutuskan untuk melakukan putusan penghentian kepada yang bersangkutan dalam jabatan beliau sebagai Wakil Menteri Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, kami sampaikan bahwa sore hari ini Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Meski demikian, pemerintah hingga kini belum menentukan sosok yang akan mengisi posisi yang ditinggalkan Silmy. Menurut Prasetyo, untuk sementara tugas-tugas harian di Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan masih dapat

dijalankan oleh menteri yang memimpin kementerian tersebut.

"Untuk sementara belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut, karena tugas keseharian masih bisa dijalankan tentunya oleh Bapak Menteriya," kata dia.

Prasetyo menegaskan proses hukum yang kini dijalani Silmy berkaitan dengan kapasitasnya sebagai wakil menteri. Karena itu, pemerintah memastikan operasional maupun pelayanan publik di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan tetap berjalan normal dan tidak terganggu.

"Karena kan yang sedang menjalani proses hukum kan kapasitas jabatannya sebagai Wakil Menteri gitu. Dan tadi pagi juga sudah kami sampaikan bahwa kami sudah berkoordinasi dengan Menteri Imipas untuk memastikan peristiwa ini tidak boleh mengganggu sama sekali pelayanan-pelayanan kepada masyarakat yang itu ada di bawah naungan Kementerian Imipas. Saya kira demikian," tandasnya.

Sebelumnya, Prasetyo juga menyampaikan bahwa pemerintah menghormati seluruh proses hukum yang sedang dijalankan aparat penegak hukum terhadap Silmy Karim.

"Tentunya pemerintah menghormati proses hukum yang sedang dijalankan oleh aparat penegak hukum baik kejaksaan maupun KPK," kata Prasetyo kepada wartawan.

Ia menegaskan pemerintah akan segera menindaklanjuti status jabatan pejabat yang tersangkut perkara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Dan berkenaan dengan jabatan yang melekat kepada mereka-mereka yang tengah menjalani proses hukum, akan segera ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya.

Lebih lanjut, Prasetyo mengungkapkan pihaknya telah berkomunikasi dengan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan tanpa hambatan meskipun salah satu pimpinan kementerian tersangkut kasus hukum. (wid,ist,kum/dya)

MISTERI PRABOWO KE DANANTARA HINGGA ISU MUNDURNYA PURBAYA

IHSG Terburuk di Dunia, Rupiah Terendah dalam Sejarah

Pasar keuangan Indonesia benar-benar kena hantam badai pada Kamis (4/6), setelah nilai tukar rupiah resmi jeblok ke level Rp18.033 per dolar AS, titik terendah sepanjang sejarah republik. Kondisi ini makin diperparah dengan rontoknya IHSG sebesar 1,70 persen ke posisi 5.839, yang menempatkan bursa saham negeri ini sebagai terburuk di dunia tahun ini. Di tengah situasi genting tersebut, kehadiran mendadak Presiden Prabowo Subianto di Wisma Danantara memancing spekulasi panas soal pengalihan kendali aset negara. Suasana makin keruh setelah muncul isu mundurnya Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, yang langsung bikin investor asing panik dan menarik modal keluar (capital outflow) hingga Rp1,43 triliun hanya dalam sehari. Kondisi ini memicu tuduhan keras akan adanya risiko "DOR" atau disorientasi ekonomi jika koordinasi antara Menkeu dan BI tidak segera sinkron. Menanggapi kabar burung tersebut, Purbaya pasang badan dan menegaskan itu hoaks belaka. Purbaya mengklaim pemerintah masih sangat solid dan meminta pasar tidak termakan rumor, meski tetap 'melempar' statemen jika stabilisasi rupiah tetap berada di tangan Bank Indonesia. Bagi investor, yang kini menjadi pertanyaan bukan hanya apakah rumor tersebut benar, melainkan apakah pemerintah mampu mengembalikan kepercayaan pasar ketika rupiah masih berada di bawah tekanan dan sentimen buruk.

Di tengah tekanan hebat yang melanda pasar keuangan Indonesia, Presiden Prabowo Subianto mendadak mendatangi Wisma Danantara Indonesia, Kamis (4/6/2026). Kunjungan yang berlangsung tertutup itu memicu berbagai spekulasi karena terjadi saat rupiah menembus level terlemah sepanjang sejarah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatat salah satu koreksi terdalam di kawasan Asia.

Kedatangan Prabowo ke kantor sovereign wealth fund milik negara tersebut berbarengan dengan beredarnya rumor pengunduran diri Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan isu reshuffle Kabinet Merah Putih.

Berdasarkan pantauan sejumlah media, Presiden tiba di Wisma Danantara sekitar pukul 14.00 WIB dan meninggalkan lokasi sekitar 30 menit kemudian. Agenda pertemuan sempat menimbulkan tanda tanya karena berlangsung ketika pasar keuangan nasional berada dalam tekanan berat.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi kemudian menjelaskan bahwa kunjungan Presiden berkaitan dengan pembahasan teknologi, kerja sama robotik, kecerdasan buatan (artificial intelligence), serta pengembangan pendidikan berbasis STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics).

"Hari ini tadi memang ada laporan berkenaan dengan masalah teknologi, berkenaan dengan masalah kerja sama robotik, dan bagaimana kerja sama pendidikan terutama STEM," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan.

Menurut Prasetyo, kunjungan tersebut bukan sesuatu yang luar biasa



Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa

karena Prabowo memang rutin memantau program-program strategis yang dijalankan Danantara, termasuk hilirisasi dan industrialisasi nasional.

"Sebagai sovereign wealth fund yang menjalankan program-program prioritas, termasuk hilirisasi dan

industrialisasi, secara rutin beliau memang sering berkunjung ke Danantara," ujarnya.

Kunjungan Presiden berlangsung saat nilai tukar rupiah kembali tertekan. Berdasarkan data Bloomberg, dolar AS menguat

Penutupan Kurs Rupiah

Hari, Tanggal	Penutupan Kurs Rupiah	Penutupan Level IHSG
Thursday, 4 June 2026	Rp18,039	5,839.78
Wednesday, 3 June 2026	Rp17,931	5,941.06
Tuesday, 2 June 2026	Rp17,863	6,195.00
Monday, 1 June 2026	Libur Hari Lahir Pancasila	Pasar Saham Tutup
Friday, 29 May 2026	Rp17,883	6,127.38
Thursday, 28 May 2026	Rp17,801	6,130.11
Wednesday, 27 May 2026	Rp17,789	6,165.40